

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PADA
KELURAHAN SANIPAH KECEMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Andi Syarifa Budur Assafi, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Pada Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Andi Syarifa Budur Assafi

NIM : 2002016089

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Kus Andarto, M.AP
NIP 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1097-1106

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PADA KELURAHAN SANIPAH KECEMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Andi Syarifa Budur Assafi ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan angka kemiskinan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian mengacu pada (1) indikator efektivitas yaitu (tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata), dan (2) faktor penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum tergolong cukup efektif dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan akses keluarga penerima manfaat terhadap layanan pendidikan bagi anak serta pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PKH belum sepenuhnya optimal. Penyaluran bantuan masih mengalami kendala dalam hal ketepatan waktu, yang berdampak pada pemanfaatan bantuan oleh keluarga penerima manfaat. Selain itu, proses graduasi belum berjalan optimal, ditandai dengan masih adanya penerima bantuan yang secara kondisi ekonomi sebenarnya telah layak untuk keluar dari program. Perubahan nyata lebih terlihat pada peningkatan pola konsumsi rumah tangga dan kemudahan akses terhadap layanan dasar, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan ekonomi keluarga. Hambatan utama dalam pelaksanaan PKH meliputi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial serta lemahnya pengawasan dan pemberdayaan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci : Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Sanipah.

Pendahuluan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) 2019, kemiskinan akan ditentukan BPS berdasarkan ketidakmampuan untuk melengkapi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan) ketika dilihat dari perspektif pengeluaran. Orang miskin

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: chipachipa0107@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran rata-rata bulannya jatuh di bawah garis kemiskinan. BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Karena karakteristik akses terbatas ke partisipasi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan publik, kemiskinan memiliki berbagai aspek. Kemiskinan adalah masalah yang rumit yang membutuhkan manajemen pemerintah yang berkelanjutan dan komprehensif.

Salah satu kebijakan publik yang dijalankan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui pemberian bantuan bersyarat, PKH diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih memperhatikan pendidikan anak dan kesehatan keluarga.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perlindungan sosial nasional. Program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, PKH juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial.

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memiliki komponen pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Regulasi ini juga mengatur hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, peran pendamping sosial, serta proses evaluasi dan graduasi penerima. Dengan adanya regulasi yang jelas, PKH diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan program.

Dalam implementasinya, efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Efektivitas program dapat diukur dari sejauh mana bantuan disalurkan kepada sasaran yang tepat, dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan, mampu mencapai tujuan program, serta memberikan perubahan nyata bagi kehidupan keluarga penerima manfaat. Program yang efektif diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagian masyarakat di wilayah ini masih tergolong sebagai keluarga miskin dan rentan, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kehadiran PKH diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan temuan lapangan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah masih menghadapi beberapa kendala, antara lain ketidaktepatan seleksi penerima manfaat sehingga bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, serta potensi ketergantungan penerima terhadap bantuan sosial yang dapat menghambat kemandirian ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PKH dengan menggunakan indikator tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian administrasi publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di masa mendatang.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dye (2017), mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dalam pandangannya, kebijakan publik adalah hasil dari pilihan pemerintah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, dengan berbagai pertimbangan tentang dampaknya terhadap masyarakat.

Dunn (2018), Dunn berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan, melibatkan serangkaian tindakan pemerintah yang diambil untuk memecahkan masalah atau merespons kebutuhan

masyarakat. Dia menekankan pentingnya proses analisis dalam kebijakan publik untuk membuat keputusan yang efektif dan tepat sasaran.

Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "effective" yang berarti sukses atau bekerja dengan baik. Menurut Pasolong (2007), efektivitas berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat. Efektivitas adalah elemen penting dalam pelaksanaan suatu program dan dalam mendekati target atau sasaran yang sudah dipastikan. Suatu program dikatakan efektif jika target dan maksud yang sudah dipastikan sebelumnya terlaksana dengan baik. Hasibuan (2003) juga berpendapat maka efektivitas merupakan pencapaian hasil kerja yang searah dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam kualitas, kuantitas, maupun waktu. Dalam konteks ini, apabila bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat disalurkan sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Sutrisno, (2010) menyatakan maka ada beberapa indikator atau perangkat ukur efektivitas yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya tujuan dan Perubahan Nyata.

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif yang menyampaikan bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga atau keluarga yang miskin dan memenuhi syarat pada tahun 2007. Persyaratan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Program ini berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan serta tujuan mengembangkan taraf sumber daya manusia di negara tersebut. Program Keluarga Harapan memiliki beberapa tujuan utama, yang secara umum berfokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga kurang mampu.

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah wanita dewasa yang baik sebagai ibu rumah tangga atau pengasuh anak di rumah tangganya. Bila tidak ada ibu, nenek, bibi atau kakak perempuan yang lebih tua bisa dipilih sebagai pemeroleh manfaat. Nama wanita yang merawat anak-anak tersebut tercantum di kartu keanggotaan Program Keluarga Harapan (PKH), bukan nama kepala rumah tangga. Dalam kasus khusus, dukungan dapat diberikan kepada kepala rumah tangga dengan surat keterangan yang diakui oleh kepala desa dan diakui oleh kepala rumah tangga. Pemeroleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan RTSM/KSM yang tinggal di lokasi tertentu dan memenuhi salah satu atau beberapa kriteria seperti, Anak SMP, Ibu Hamil, Anak Balita, dan Lansia.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan beberapa konsep yang ada, maka penulis mendeskripsikan definisi konsepsional Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu ukuran yang menerangkan tingkat keberhasilan dari segi tercapai tidaknya target pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan bisa memberantas

masalah kemiskinan pada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni pendidikan dan kesehatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah. Lokasi penelitian dipilih karena wilayah tersebut merupakan salah satu penerima PKH dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang cukup signifikan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pendamping PKH, aparat kelurahan, dan keluarga penerima manfaat, serta melalui observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus analisis diarahkan pada empat indikator efektivitas program, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menurunkan angka kemiskinan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010) keberhasilan suatu Program diukur berdasarkan sejumlah indikator yang diantaranya sebagai berikut :

a. Tepat Sasaran

Efektivitas suatu program merupakan ukuran sejauh mana tujuan program berhasil dicapai dengan tepat, melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran. Menurut Kettner, Moroney, dan Martin (2008), efektivitas program mencerminkan keberhasilan dalam mencapai hasil yang direncanakan melalui penggunaan sumber daya secara efisien kepada kelompok yang tepat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya adalah ketepatan sasaran penerima manfaat. Tepat sasaran merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas program sosial. Menurut Sutrisno (2010), tepat sasaran merupakan salah satu indikator efektivitas, yaitu keadaan ketika program atau kegiatan yang dilaksanakan benar-benar ditujukan kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Hidayat (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan tepat sasaran apabila data penerima manfaat diperoleh dari sumber yang valid dan akurat, serta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penekanan terhadap validitas data dan seleksi penerima menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan

benar- benar menyentuh keluarga miskin yang paling membutuhkan. Tepat sasaran hanya dapat tercapai jika proses pendataan, verifikasi, dan validasi dilakukan secara menyeluruh, dengan keterlibatan aktif dari pihak kelurahan dan pendamping yang memahami kondisi riil masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah penelitian telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam hal pemutakhiran data agar keadilan distribusi bantuan dapat benar-benar terwujud. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2018), bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya tepat sasaran, karena masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria serta keluarga miskin yang seharusnya berhak namun belum menerima bantuan. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakakuratan data penerima dan lemahnya proses verifikasi di lapangan.

b. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah indikator penting dalam mengukur efektivitas suatu program sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Sutrisno (2010), tepat waktu berarti bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jika bantuan sosial disalurkan tepat waktu, maka tujuan program untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, keterlambatan dapat berdampak negatif terhadap kebermanfaatan program dan mengganggu perencanaan pengeluaran keluarga miskin. Nanik Nikmatul Janah (2023), tepat waktu penyaluran bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Tepat waktu sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara pihak Kementerian Sosial, bank penyalur, dan pendamping sosial agar penyaluran bantuan dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di kelurahan Sanipah, bahwa meskipun pihak kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), mereka tetap menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi dan pemantau informasi pencairan. Koordinasi antara kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan dinas sosial dilakukan secara rutin untuk memastikan informasi pencairan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah sudah berjalan dengan cukup optimal. Berbeda dengan penelitian Hidayat (2018), yang menyimpulkan bahwa penyaluran PKH belum tepat waktu akibat kendala administratif dan teknis dalam proses pencairan bantuan.

c. Tercapainya Tujuan

Menurut Sutrisno (2010), tercapainya tujuan merupakan indikator efektivitas yang menunjukkan bahwa program telah memberikan hasil nyata dan bermanfaat bagi sasaran. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang

dimaksud antara lain adalah meningkatnya taraf hidup keluarga penerima manfaat, terpenuhinya kebutuhan dasar, keberlanjutan pendidikan anak, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi. Keberhasilan implementasi suatu program dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Inti dari tercapainya tujuan adalah bahwa program mampu memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan, seperti peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan pendidikan, serta munculnya kemandirian keluarga penerima. Tujuan hanya dapat tercapai apabila pelaksanaan program dilakukan secara konsisten, terarah, dan didukung oleh pemantauan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dilapangan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah telah berjalan dengan cukup baik, meskipun tetap diperlukan upaya lanjutan untuk mendorong kemandirian yang lebih kuat bagi keluarga penerima manfaat.

Sejalan dengan penelitian Hidayat (2018), bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai berhasil apabila terdapat perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi keluarga miskin, khususnya dalam bentuk peningkatan akses pendidikan, tercukupinya kebutuhan dasar, serta terbentuknya pola hidup yang lebih mandiri.

d. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Kettner, Moroney, dan Martin (2008:262), efektivitas suatu program tercermin dari tercapainya hasil atau dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya perubahan konkret dalam kondisi kehidupan kelompok sasaran. Dengan kata lain, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi dari sejauh mana program tersebut menciptakan perubahan positif di masyarakat. Dalam konteks ini, Sutrisno (2010) menjelaskan bahwa perubahan nyata adalah hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan atau program yang dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat. Perubahan tersebut mencakup perbaikan dalam kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, maupun akses terhadap pendidikan. Indikator perubahan ini sangat penting untuk menilai apakah bantuan sosial yang diberikan bersifat konsumtif semata atau mampu menjadi stimulan untuk perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sanipah menunjukkan bahwa perubahan nyata dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terlihat terutama dalam aspek pendidikan. Sebagian besar penerima manfaat mengakui bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memungkinkan anak-anak mereka tetap bersekolah, karena dana tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pendidikan seperti seragam, alat tulis, dan buku. Hal ini

mengindikasikan bahwa program telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keluarga miskin. Selain itu, beberapa penerima manfaat juga mulai memanfaatkan bantuan untuk kegiatan produktif. Berbeda dengan penelitian Hidayat (2018), bahwa PKH belum menunjukkan perubahan nyata yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Faktor Penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

Hal-hal yang menjadi kendala merupakan faktor penghambat yang dapat mengakibatkan terhambatnya suatu program. Kendala dalam Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Menurunkan Angka Kemiskinan sebagai berikut :

- 1) Ketergantungan Masyarakat terhadap bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang semestinya bersifat sementara dan mendorong perubahan perilaku justru dalam praktiknya sering dianggap sebagai sumber utama penghidupan oleh sebagian penerima. Hal ini menimbulkan kondisi di mana masyarakat menjadi pasif dan tidak terdorong untuk mencari penghasilan sendiri atau meningkatkan kesejahtraannya secara mandiri. Hal ini sama dengan penelitin Yadika (2024), bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial PKH tergolong tinggi, ditandai dengan skor tinggi dalam pengukuran variabel ketergantungan, dan bahwa bantuan PKH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat ketergantungan masyarakat, yang turut menghambat pencapaian kemandirian ekonomi pada keluarga penerima.
- 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya memiliki peran penting dalam memantau, membimbing, dan memberdayakan keluarga penerima manfaat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan belum berjalan maksimal. Pendamping seringkali tidak hadir secara rutin atau tidak menjalin komunikasi intensif dengan penerima bantuan. Selain itu pendamping PKH bertugas melakukan pendampingan KPM, verifikasi dan pemutakhiran data, pemantauan kepatuhan, koordinasi lintas sektor, pelaporan, serta mendorong kemandirian dan graduasi penerima manfaat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah, masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan secara optimal, meskipun program ini telah menunjukkan kontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah tergolong cukup efektif dalam membantu mengurangi beban kemiskinan keluarga penerima manfaat. Program ini telah tepat sasaran dan penyaluran bantuan umumnya dilakukan sesuai jadwal. Tujuan program dalam mendukung pemenuhan

kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan konsumsi rumah tangga telah tercapai. Namun, perubahan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masih terbatas. Hambatan utama pelaksanaan PKH adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan serta belum optimalnya pengawasan dan pemberdayaan oleh pendamping PKH.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sanipah, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat melalui motivasi, pendampingan, serta pelatihan keterampilan dan kegiatan ekonomi produktif.
- 2) Memperkuat peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan fungsi pengawasan, dan dukungan sarana kerja yang memadai.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Buku Kerja Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (2020). *Petunjuk Teknis Pendampingan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terj. M. Farid)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edy Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Halimatussa'diah. (2025). *Strategi Komunikasi dalam Pendamping PKH sebagai Instrumen Pemberdayaan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat*.
- Hidayat, A. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu*. Public Administration
- Infitah, N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

- Prasetio, D. N., Sari, D. I., & Fania Pratiwi. (2013). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung Alfabeta
- Suparlan, Parsudi. (2001). Kemiskinan: Sebuah Perspektif Sosial. Jakarta.
- Yadika. (2024). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Tingkat Ketergantungan Masyarakat di Desa Waru Jaya.